

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Rerangka Teori

1. Teori Akuntansi Positif

Teori akuntansi positif adalah proses yang menggunakan kemampuan, pemahaman, serta pengetahuan ilmu akuntansi dalam pemilihan kebijakan akuntansi yang sesuai dengan tujuan tertentu dalam menghadapi suatu keadaan dimasa depan (Watts dan Zimmerman, 1986). Teori akuntansi positif menjelaskan bahwa setiap perusahaan memiliki kebijakan akuntansi yang berbeda satu sama lain, dan perusahaan bebas untuk menentukan salah satu alternatif kebijakan akuntansi yang tersedia yang dapat meminimalisir biaya kontrak dan memaksimalkan nilai perusahaan. Kebebasan yang diberikan kepada manajer perusahaan untuk menentukan kebijakan akuntansi akan menyebabkan manajer melakukan kecenderungan untuk melakukan tindakan oportunitis (Scott, 2009). Tindakan oportunitis dalam menentukan kebijakan akuntansi bertujuan untuk menguntungkan manajer yang akhirnya tingkat kepuasan manajer akan meningkat.

Terdapat tiga hipotesis yang dihubungkan dengan perilaku oportunistik manajemen oleh Watts dan Zimmerman (1986) yaitu *bonus plan hypothesis*, *debt covenant hypothesis*, dan *political cost hypothesis*. Hipotesis tersebut digunakan untuk menjawab dan menjelaskan alasan suatu praktik akuntansi dipilih oleh suatu perusahaan serta memperkirakan peran

akuntansi dan informasi terhadap kebijakan ekonomi yang diambil oleh perusahaan, individu, dan pihak lainnya.

Penelitian oleh Watts dan Zimmerman (1986) menemukan bahwa hipotesis rencana bonus (*bonus plan hypothesis*) ditunjukkan melalui sikap manajer terhadap pemilihan suatu metode akuntansi yang dapat meningkatkan kompensasi yang didapatkannya. Hipotesis kontrak hutang (*debt covenant hypothesis*) ditunjukkan dengan mengurangi kemungkinan terlanggarnya perjanjian obligasi (*bond covenant*). Sedangkan pada hipotesis biaya politik (*political cost hypothesis*) ditunjukkan dengan pemilihan prosedur akuntansi, yaitu perusahaan besar memiliki kecenderungan menggunakan prosedur akuntansi yang dapat mengurangi labanya dalam laporan keuangan.

2. Aset dan Karakteristik Aset

PSAK No 16 (Revisi 2011) menyebutkan aset yaitu semua kekayaan yang dimiliki oleh seseorang ataupun perusahaan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud serta memiliki nilai sehingga dapat mendatangkan manfaat bagi pemiliknya. Manfaat ekonomi masa depan aset yang dimiliki harus dapat memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung bagi arus kas dan setara kas. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) di Indonesia menyebutkan bahwa sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan menghasilkan manfaat ekonomis di masa depan bagi

perusahaan disebut dengan aset. Menurut *International Financial Reporting Standards* (IFRS) tahun 2008 menyebutkan

“an asset is a resource controlled by the enterprise as a result of past events and from which future economic benefits are expected to flow to the enterprise.”

Suardjono (2013) menyebutkan di dalam bukunya bahwa agar suatu objek dapat disebut sebagai aset, maka tiga karakteristik utama aset harus dipenuhi oleh objek tersebut, yaitu:

1. Objek tersebut harus memiliki manfaat ekonomik masa depan yang cukup pasti.
2. Objek tersebut dikuasai atau dapat dikendalikan oleh perusahaan dan tidak harus dimiliki oleh perusahaan.
3. Objek tersebut timbul akibat transaksi yang dilakukan pada masa lalu.

Aset pada neraca secara umum dibagi menjadi dua kelompok, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. PSAK No 1 (Revisi 2009) menyebutkan bahwa aset lancar dan aset tidak lancar perusahaan disajikan secara terpisah, dan aset lancar disajikan berdasarkan ukuran likuiditasnya.

3. Aset Tetap

SAK No 16 menyebutkan aset tetap yaitu perolehan aset berwujud yang siap untuk dipakai maupun dengan dibangun terlebih dahulu yang akan digunakan untuk kegiatan operasi perusahaan, tidak bermaksud untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun kecuali dalam keadaan tertentu, seperti aset tersebut rusak dan dapat dijual. Kieso *et al* (2010) menjelaskan bahwa aset tetap yaitu aset

berwujud yang dimiliki perusahaan untuk digunakan dalam memproduksi barang maupun jasa sehingga dapat disewakan kepada pihak lain, untuk tujuan administrasi serta memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun.

Contoh dari aset tetap yaitu tanah, gedung, kendaraan, mesin, dan sebagainya. Berdasarkan tujuan akuntansi maka aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan dapat digolongkan dalam aset tetap yang pada umumnya tidak terbatas, seperti tanah, lahan perkebunan, lahan pertanian, lahan peternakan, dan sebagainya. Aset tetap tersebut dapat digunakan secara terus menerus tanpa harus diperbaiki maupun digantikan apabila perusahaan menghendakinya. Sedangkan aset tetap yang terbatas yaitu aset tetap yang memiliki umur ekonomis terbatas dan dapat diganti oleh aset tetap lainnya yang sejenis apabila masa ekonomis aset tersebut telah habis, seperti mesin, kendaraan, mebel, dan sebagainya.

PSAK No 16 (Revisi 2011) menyebutkan biaya perolehan aset tetap harus diakui sebagai aset jika dan hanya jika memiliki kemungkinan yang besar bahwa perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut dan pengukuran secara andal dapat dilakukan terhadap biaya perolehan aset tersebut. Berdasarkan penyusutannya maka aset tetap dapat dikelompokkan kedalam dua jenis, yaitu:

a. *Depreciable assets*, yaitu aset tetap yang dapat dilakukan penyusutan.

Contohnya bangunan, kendaraan, mesin, dan peralatan.

b. *Nondepreciable assets*, yaitu aset tetap yang tidak dapat dilakukan penyusutan. Contohnya tanah.

Berdasarkan kondisi tersebut maka diperlukan pertimbangan dalam penerapan kriteria dalam pengakuan aset tetap. Prinsip pengakuan aset tetap terhadap semua biaya perolehan yang terjadi harus dapat dievaluasi oleh entitas, termasuk biaya perolehan awal atau biaya untuk mengkonstruksi aset tetap serta biaya yang dibutuhkan untuk menambah, mengganti, maupun memperbaiki (PSAK No 16 Revisi 2011).

Metode penilaian dan penyajian aset tetap memiliki pengaruh pada laporan keuangan perusahaan, hal tersebut diakibatkan oleh nilai aset tetap perusahaan cukup material dibandingkan dengan total asetnya. Aset tetap yang diakui sebagai aset harus diukur pada biaya perolehan awalnya. IAS 16 mendefinisikan biaya perolehan sebagai:

“cost is the amount of cash or cash equivalents paid or the fair value of the other consideration given to acquire an asset at the time of its acquisition or construction or, where applicable, the amount attributed to that assets when initially recognized in accordance with the specific requirements of other IFRSs, eq IFRS 2 Share-based Payment.”

PSAK No 16 (Revisi 2011) menjelaskan bahwa entitas harus memilih metode penilaian awal aset tetap setelah pengakuan awalnya sebagai kebijakan akuntansi yaitu antara model biaya atau dengan model revaluasi dan menerapkannya pada keseluruhan kelompok yang sama dalam aset tetap. Pada model biaya, suatu objek yang telah diakui sebagai aset tetap maka akan dicatat sesuai biaya perolehannya kemudian dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset (PSAK No 16 Revisi 2011). Sedangkan model revaluasi yaitu pengukuran aset tetap

yang nilai wajarnya dicatat dengan jumlah revaluasian yang berupa nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset yang terjadi setelah tanggal revaluasi.

4. Revaluasi Aset Tetap

Peninjauan kembali terhadap nilai dari aset tetap disebut dengan revaluasi aset tetap. IAS 16 mendefinisikan bahwa nilai wajar yaitu jumlah aktiva yang dapat saling ditukarkan antara pihak yang memahami dan memiliki keinginan dalam transaksi yang wajar. Tay (2009) menyebutkan bahwa revaluasi lebih sering dimaknai terhadap penilaian ulang yang menghasilkan nilai suatu aset menjadi lebih tinggi, padahal revaluasi aset tidak selalu menghasilkan nilai aset yang lebih tinggi, tetapi juga lebih rendah dari aset yang tercatat. Apabila suatu aset tetap direvaluasi maka jumlah tercatat aset tetap tersebut harus disesuaikan terhadap jumlah revaluasinya (PSAK No 16 Penyesuaian 2015).

Dalam setiap periode, tidak harus dilakukan revaluasi. Tetapi apabila terdapat perubahan pada nilai wajar dari aset yang direvaluasi maka perlu dilakukan revaluasi. Apabila terdapat perbedaan yang material dari nilai wajar pada aset yang direvaluasi dengan jumlah tercatatnya maka perlu dilakukan revaluasi lanjutan. Apabila setelah dilakukan revaluasi jumlah aset tercatat mengalami peningkatan, maka peningkatan tersebut langsung dikreditkan pada bagian surplus revaluasi di ekuitas dan pada laporan laba rugi harus diakui pada jumlah penurunan nilai aset revaluasinya yang sebelumnya sudah diakui. Hal tersebut juga berlaku pada penurunan nilai

aset akibat revaluasi aset, tetapi penurunan nilai tersebut langsung didebit pada bagian surplus revaluasi di ekuitas selama penurunan tersebut melebihi saldo kredit surplus revaluasi aset tersebut.

5. *Leverage*

Perusahaan memiliki sumber pendanaan yang terbagi dalam dua jenis yaitu pendanaan internal dan pendanaan eksternal. Modal saham yang dimiliki oleh perusahaan merupakan pendanaan internal, sedangkan pinjaman dari kreditur yang diperoleh perusahaan merupakan pendanaan eksternal. Kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya dapat diukur dengan rasio *leverage*. Rasio *leverage* juga berfungsi untuk mengukur proporsi aset yang didanai dari hutang dengan yang didanai dari ekuitas (Harahap, 2007).

Jika perusahaan memiliki tingkat *leverage* yang semakin meningkat maka akan menyebabkan biaya agensi yang semakin tinggi terkait dengan biaya yang dikeluarkan oleh kreditur sebagai pengawas pada perusahaan dengan tingkat hutang yang tinggi, apakah perusahaan dapat melunasi hutangnya sehingga akan mendorong kreditur meningkatnya biaya agensinya. Army (2013) menjelaskan apabila suatu perusahaan dalam membiayai investasinya menggunakan struktur hutang yang tinggi maka perusahaan tersebut dinilai memiliki risiko. Terdapat dua rasio *leverage* yang digunakan oleh para peneliti yaitu *debt to total aset* dan *debt to equity ratio*. Namun hanya *debt to total asset ratio* yang digunakan dalam penelitian ini.

Debt to total asset ratio berfungsi untuk menghitung persentase dana dari kreditur yang dihitung melalui total hutang dibagi total aset.

6. Firm Size

Biaya politik yang semakin besar yang dimiliki oleh perusahaan akan menyebabkan perusahaan cenderung menggunakan kebijakan akuntansi yang dapat menanggukkan pendapatan periode masa kini ke periode masa depan. Penjelasan tersebut didasarkan atas asumsi jika perusahaan yang memiliki biaya politik yang besar maka akan lebih sensitif terhadap mentransferkan kemakmurannya yang lebih besar jika dibandingkan perusahaan yang memiliki biaya politik yang lebih kecil. Sehingga menurut Watts dan Zimmerman (1986) apabila perusahaan besar dibandingkan pada perusahaan kecil maka perusahaan besar akan cenderung menurunkan maupun mengurangi laba yang dilaporkan. Biaya politis yaitu fungsi pada tingkat pengawasan politik dan pentingnya perusahaan dalam menyalurkan kekayaannya terhadap dampak dari kegiatan politik masyarakat pada perusahaan (Mills *et al*, 2010).

Ukuran perusahaan dijadikan sebagai salah satu proksi dari biaya politis oleh Seng dan Su (2010) dalam penelitiannya. Basis pemegang kepentingan akan menjadi lebih luas apabila ukuran suatu perusahaan semakin besar sehingga akan menyebabkan kebijakan yang diambil oleh perusahaan besar akan berdampak lebih besar terhadap kepentingan publik jika dibandingkan perusahaan kecil. Dari sudut pandang investor maka kebijakan yang diambil oleh suatu perusahaan akan memiliki dampak pada

arus kas dimasa depan. Sedangkan dari sudut pandang pemerintah sebagai regulator maka akan memiliki dampak pada besarnya pajak yang diterimanya dan efektifitas dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat secara umum.

Total aset, penjualan dan kapitalisasi pasar dapat digunakan untuk menyatakan ukuran suatu perusahaan. Apabila suatu perusahaan memiliki total aset, penjualan dan kapitalisasi pasar yang besar, maka ukuran perusahaan tersebut semakin besar. Total aset, penjualan dan kapitalisasi pasar dapat mewakili seberapa besar ukuran perusahaan, maka variabel tersebut dapat menentukan ukuran perusahaan. Namun menurut Sudarmadji dan Sularto (2007), total aset memiliki nilai yang relatif lebih stabil dari ketiga variabel tersebut, oleh sebab itu total aset digunakan untuk menentukan ukuran suatu perusahaan.

7. *Fixed Asset Intensity*

Seng dan Su (2010) menggunakan intensitas aset tetap (*fixed asset intensity*) sebagai salah satu faktor dari informasi asimetri. Informasi asimetri menurut Scott (1997) terjadi apabila informasi lebih dimiliki oleh salah satu pihak dibandingkan pihak lainnya dari suatu transaksi. Untuk mengukur informasi asimetri maka dapat menggunakan intensitas aset tetap (*fixed asset intensity*). Tay (2009) menyebutkan bahwa intensitas aset tetap (*fixed asset intensity*) merupakan proporsi aset perusahaan yang terdiri atas aset tetap. Intensitas aset tetap (*fixed asset intensity*) dapat

mempresentasikan proporsi aset tetap perusahaan dibandingkan dengan total asetnya.

Intensitas aset tetap (*fixed asset intensity*) dihitung dengan nilai buku dari total aset tetap dibagi dengan total aset (Barac dan Šodan, 2011). Keputusan revaluasi perusahaan dapat dipengaruhi oleh intensitas aset tetap (*fixed asset intensity*) melalui dua cara. Aset tetap merupakan jaminan perusahaan, sehingga rasio intensitas aset tetap (*fixed asset intensity*) yang rendah akan memotivasi manajer dalam mengungkapkan aset tetapnya pada nilai pasar dan yang dapat meningkatkan kapasitas pinjaman. Berdasarkan hal tersebut diharapkan hubungan antara intensitas aset tetap (*fixed asset intensity*) terhadap revaluasi adalah negatif. Di sisi lain, semakin banyak aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan maka akan semakin tinggi nilai rasio intensitas aset tetapnya (*fixed asset intensity*) dan efek revaluasi yang dihasilkan semakin besar. Berdasarkan hal tersebut diharapkan hubungan antara intensitas aset tetap (*fixed asset intensity*) terhadap revaluasi adalah positif (Barlev *et al*, 2007).

8. Declining Cash Flow from Operation

Terdapat tiga aktivitas yang terbagi di dalam laporan arus kas, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Aktivitas operasi merupakan aktivitas utama perusahaan yang menjadi pusat untuk memperoleh pendapatan bagi perusahaan. Aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan bukan merupakan aktivitas utama perusahaan dalam memperoleh pendapatan. Arus kas dari aktivitas operasi menggambarkan

besarnya arus kas yang dihasilkan oleh aktivitas operasi. Jumlah tersebut adalah indikator utama yang digunakan untuk menentukan apakah aktivitas operasi yang dilakukan perusahaan menghasilkan arus kas yang dapat digunakan untuk membayar deviden, membayar pinjaman dan menjaga kemampuan operasi perusahaan.

Model revaluasi aset tetap dapat menyebabkan nilai yang lebih tinggi terhadap aset jaminan perusahaan sehingga akan meyakinkan *debt holders* terhadap kemampuan perusahaan dalam membayarkan hutangnya melalui aset perusahaan yang lebih tinggi sesuai nilai pasar yang dapat mengembalikan kapasitas pinjaman perusahaan. Sehingga penurunan arus kas yang terjadi pada perusahaan akan menyebabkan perusahaan cenderung lebih memilih model revaluasi.

9. *Ownership Control*

Struktur kepemilikan dapat digolongkan dalam dua blok, yaitu blok kepemilikan eksternal dan blok kepemilikan internal. Struktur kepemilikan menunjukkan adanya sumber daya yang dikorbankan secara efisien untuk menghasilkan laba yang maksimal dimana insentif manajer dalam memaksimalkan laba dapat berkurang karena kepemilikan yang tersebar. Menurut Wicaksono (2000) dalam struktur kepemilikan terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu :

- a. Porsi kepemilikan perusahaan yang sedikit oleh manajemen akan menyebabkan perusahaan cenderung memaksimalkan nilai pemegang saham dibandingkan mencapai tujuan perusahaan.

- b. Pemegang saham mayoritas diberikan insentif apabila kepemilikannya terdifusi sehingga mengakibatkan mereka secara aktif dapat terlibat di perusahaan.
- c. Prioritas perusahaan pada tujuan sosial dan pemaksimalan nilai pemegang saham ditentukan oleh identitas pemilik perusahaan.

Pihak-pihak yang memiliki saham perusahaan dijabarkan dalam struktur kepemilikan saham. Struktur kepemilikan saham menggambarkan pemegang kekuasaan perusahaan melalui jumlah saham yang dimiliki oleh setiap pihak. *Blockholder* didefinisikan oleh Thomsen (2006) sebagai kepemilikan paling sedikitnya 5% oleh para pemegang saham. Konflik keagenan antara manajer dengan para pemegang saham dapat dikurangi melalui *blockholder ownership*. Hal tersebut disebabkan karena kepemilikan saham yang terkonsentrasi dapat menyebabkan para pemegang saham menggunakan kekuasaan dalam pengambilan keputusan dan pengawasan manajemen (Putri, 2014).

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Seng dan Su (2010) meneliti alasan yang mendasari manajer memilih melakukan revaluasi menaik atas aset tetap pada perusahaan di New Zealand. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *contracting factors* yang diprosikan oleh *firm size* memiliki pengaruh signifikan terhadap revaluasi menaik. Sedangkan variabel *leverage level*, *declining cash flow from operation*, *prior revaluation*, *growth options*, *takeover offer*, dan *bonus issue* tidak memiliki pengaruh terhadap revaluasi aset tetap menaik. Variabel *fixed asset intensity*

dalam pengujian *univariate* menghasilkan nilai yang signifikan namun dalam pengujian model regresi logistik menghasilkan nilai yang tidak signifikan.

Barać dan Šodan (2011) meneliti motif manajer terhadap pemilihan kebijakan revaluasi menaik untuk aset non keuangan jangka panjang pada perusahaan di Kroasia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *liquidity*, *debt growth*, *firm size* dan ROE memiliki arah koefisien yang sesuai dengan hipotesis dan memiliki nilai yang signifikan secara statistik pada tingkat 5%. Sedangkan variabel *operating income to incomet cost*, *level of indebtedness*, *fixed asset intensity* dan *cash return on equity* memiliki nilai yang tidak signifikan di tingkat 5%. *Cash flow ratios* memiliki nilai yang signifikan secara statistik namun arah koefisien yang dihasilkan tidak sesuai dengan yang dihipotesiskan.

Nurjanah (2013) meneliti faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keputusan revaluasi aset tetap pada perusahaan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel *leverage*, ukuran perusahaan, struktur aset, pertumbuhan perusahaan, *investemnt opportunity set* (IOS), penurunan kas dari aktivitas operasi, *ownership control*, *merger* dan akuisisi memiliki pengaruh terhadap keputusan revaluasi aset. Namun secara parsial hanya struktur aset, *investemnt opportunity set* (IOS), dan *ownership control* yang memiliki pengaruh secara signifikan.

Manihuruk dan Farahmita (2015) meneliti faktor-faktor yang memengaruhi pemilihan metode revaluasi aset tetap pada perusahaan di Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa variabel intensitas aset tetap dan *leverage* memiliki pengaruh terhadap revaluasi aset tetap. Sedangkan variabel ukuran perusahaan dan likuiditas tidak memiliki pengaruh terhadap revaluasi aset tetap. Yulistia, dkk (2015) meneliti pengaruh *leverage*, arus kas operasi, ukuran perusahaan dan *fixed asset intensity* terhadap revaluasi menaik aset tetap pada perusahaan di Indonesia. Penelitian ini tidak berhasil membuktikan bahwa variabel *leverage*, arus kas operasi, ukuran perusahaan dan *fixed asset intensity* memiliki pengaruh terhadap revaluasi menaik aset tetap.

Ramadhani (2016) meneliti faktor-faktor yang memengaruhi keputusan revaluasi aset tetap pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Indonesia dan Singapura. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa variabel *fixed asset intensity* berpengaruh terhadap keputusan revaluasi aset tetap di Indonesia dan Singapura. Namun variabel *liquidity* hanya berpengaruh di Indonesia sedangkan di Singapura *liquidity* tidak berpengaruh. Variabel *firm size*, *level of indebtedness*, dan *declining cash flow from operation* tidak berpengaruh di Indonesia dan Singapura.

Wicaksana (2016) meneliti faktor-faktor yang memengaruhi keputusan revaluasi aset tetap pada perusahaan di Indonesia. Penelitian ini memberikan hasil bahwa variabel kesehatan keuangan dan karakteristik aset berpengaruh terhadap revaluasi aset tetap. Sedangkan variabel struktur kepemilikan dan umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap revaluasi aset tetap.

C. Logika Hipotesis

1. Pengaruh *Leverage* Terhadap Kebijakan Revaluasi Aset Tetap

Rasio *leverage* yaitu rasio yang berfungsi untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayarkan kewajiban jangka pendek dan jangka panjangnya, serta untuk mengukur proporsi aset perusahaan yang dibiayai dari utang tersebut. Watts dan Zimmerman (1986) dalam teori akuntansi positifnya menjelaskan bahwa perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi terutama yang dekat terhadap pelanggaran perjanjian utang akan menyebabkan kecenderungan manajer untuk memilih metode dan prosedur akuntansi yang dapat menghindarkan perusahaan dari pelanggaran perjanjian utang.

Semakin tinggi tingkat rasio *leverage* perusahaan, maka semakin tinggi kecenderungan manajer untuk melakukan revaluasi. Hal tersebut disebabkan karena rasio *leverage* yang tinggi akan menyebabkan risiko kerugian yang tinggi terhadap perusahaan sehingga dari sudut pandang kreditor hal tersebut akan berdampak pada menurunnya tingkat kelayakan perusahaan. Tingkat rasio *leverage* yang tinggi akan mendorong manajer perusahaan untuk memilih metode revaluasi aset tetap karena metode tersebut dapat menghasilkan nilai aset perusahaan yang meningkat dan dapat meningkatkan nilai ekuitas karena metode revaluasi aset tetap mengakui keuntungan hasil revaluasinya.

Meningkatnya nilai aset perusahaan setelah revaluasi akan menyebabkan menurunnya rasio *leverage* sehingga dapat meyakinkan pihak

kreditor bahwa perusahaan memiliki aset bersih yang tinggi yang hal tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan mampu membayar kredit yang diberikan bahkan jika terjadi likuidasi pada perusahaan. Sedangkan meningkatnya nilai ekuitas perusahaan, dapat meningkatkan kelayakan penerimaan kredit dari sudut pandang pihak kreditor. Menurut Seng dan Su (2010), negosiasi kontrak utang dengan pihak kreditor dapat diperkuat apabila perusahaan melakukan revaluasi aset tetap.

Nurjanah (2013) dan Yulistia, dkk (2015) meneliti perusahaan di Indonesia dan tidak berhasil memberikan bukti bahwa *leverage* berpengaruh terhadap revaluasi aset tetap. Namun bukti empiris berhasil ditunjukkan oleh Piera (2007) terhadap perusahaan di Swiss yaitu apabila tingkat *leverage* suatu perusahaan tinggi, maka akan semakin mendorong perusahaan dalam menerapkan metode revaluasi untuk asetnya. Hal tersebut disebabkan karena revaluasi merupakan metode yang dapat memberikan signal pada peningkatan kapasitas pinjaman, meningkatkan *credit rating*, dan mengurangi kemungkinan dilanggarnya *debt covenant*. Brown *et al* (1992) mendukung hasil penelitian tersebut dengan melakukan penelitian mengenai revaluasi aset tetap dan insentif manajerial terhadap perusahaan di Australia. Penelitian oleh Brown *et al* (1992) berhasil menemukan bukti empiris yaitu semakin tinggi tingkat *leverage* maka kemungkinan manajer memilih menggunakan metode revaluasi akan semakin tinggi.

Barac dan Šodan (2011) meneliti mengenai motif pemilihan kebijakan revaluasi pada perusahaan di Kroasia dan berhasil menemukan bukti

empiris bahwa perusahaan dengan *growing debt* akan melakukan revaluasi aset. Bukti empiris lainnya juga berhasil dibuktikan oleh Lin dan Peasnell (2000) yang meneliti mengenai revaluasi aset tetap dan penurunan ekuitas pada perusahaan di United Kingdom bahwa *leverage* memiliki hubungan terhadap tindakan revaluasi aset. Manihuruk dan Farahmita (2015) melakukan penelitian terhadap perusahaan di ASEAN berhasil membuktikan bahwa *leverage* memiliki hubungan positif terhadap revaluasi aset.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis menarik hipotesis sebagai berikut:

H_{1a} : *Leverage* berpengaruh positif terhadap kebijakan revaluasi aset tetap di Indonesia.

H_{1b} : *Leverage* berpengaruh positif terhadap kebijakan revaluasi aset tetap di Malaysia.

2. Pengaruh *Firm Size* Terhadap Kebijakan Revaluasi Aset Tetap

Political factor yang sering dijadikan proksi dalam penelitian adalah *firm size* (ukuran perusahaan). *Firm size* (ukuran perusahaan) menjadi suatu faktor yang sangat penting terhadap keputusan revaluasi aset tetap. Perusahaan besar cenderung lebih sensitif secara politis dan dikenakan transfer kekayaan yang lebih besar daripada perusahaan kecil dan hal tersebut dapat menyebabkan perusahaan besar akan menurunkan laba yang dilaporkannya (Watts dan Zimmerman, 1986).

Semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka semakin tinggi kecenderungan manajer untuk melakukan revaluasi, karena semakin besarnya ukuran suatu perusahaan maka akan semakin menarik perhatian dan pengawasan oleh pemerintah dan publik. Berdasarkan biaya politik, semakin besar perusahaan maka perusahaan tersebut akan semakin cenderung mengurangi labanya dengan tujuan untuk mengurangi biaya politik sehingga tekanan politik dari pemerintah maupun dari serikat buruh yang dihadapi perusahaan dapat berkurang. Melalui metode revaluasi yang dilakukan atas aset tetapnya maka laba periode sekarang perusahaan dapat berkurang. Karena metode revaluasi aset tetap dapat meningkatkan nilai aset yang dapat menyebabkan biaya penyusutan meningkat serta dibutuhkannya biaya tambahan bagi perusahaan yaitu biaya untuk penilaian aset.

Nurjanah (2013) dan Yulistia, dkk (2015) tidak berhasil membuktikan bahwa *size* berpengaruh terhadap revaluasi aset tetap. Namun penelitian mengenai revaluasi aset tetap dan penurunan ekuitas oleh Lin dan Peasnell (2000) berhasil membuktikan pada perusahaan di United Kingdom bahwa ukuran perusahaan memiliki hubungan positif terhadap revaluasi. Hasil tersebut didukung oleh Seng dan Su (2010) yang melakukan penelitian mengenai insentif manajerial dibalik revaluasi aset tetap terhadap perusahaan di New Zealand. Seng dan Su (2010) membuktikan bahwa ukuran perusahaan memiliki hubungan positif dan signifikan pada revaluasi menaik karena revaluasi digunakan untuk mengurangi biaya politik. Barac dan Šodan (2011) meneliti mengenai motif pemilihan kebijakan revaluasi

pada perusahaan di Kroasia dan membuktikan bahwa perusahaan besar dengan ROE yang besar akan cenderung merevaluasi asetnya untuk mengurangi pelaporan laba dan mengurangi perhatian pemerintah.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis menarik hipotesis sebagai berikut:

H_{2a} : *Firm Size* berpengaruh positif terhadap kebijakan revaluasi aset tetap di Indonesia.

H_{2b} : *Firm Size* berpengaruh positif terhadap kebijakan revaluasi aset tetap di Malaysia.

3. Pengaruh *Fixed Asset Intensity* Terhadap Kebijakan Revaluasi Aset Tetap

Informasi asimetri terjadi apabila dalam transaksi salah satu pihak memiliki informasi yang lebih dibandingkan pihak lainnya (Scott, 2009). Seng dan Su (2010) menggunakan *fixed asset intensity* (intensitas aset tetap) sebagai salah satu dari faktor yang diuji terkait dengan informasi asimetri. Bagian terbesar dalam total aset yaitu aset tetap. Aset tetap dapat menyebabkan nilai perusahaan meningkatkan dan oleh sebab itu potensi yang dimilikinya besar terhadap peningkatan basis aset dengan meningkatkan kapasitas pinjaman perusahaan sehingga pemilihan model revaluasi sesuai untuk diterapkan (Tay, 2009).

Semakin tinggi proporsi aset tetap perusahaan, maka semakin tinggi kecenderungan manajer untuk melakukan revaluasi. Modal operasi jangka panjang perusahaan ditunjukkan melalui aset tetapnya, sehingga intensitas

aset tetap yang tinggi akan berdampak signifikan terhadap laporan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh perubahan penilaian aset tetapnya. *Fixed asset intensity* (intensitas aset tetap) dapat menggambarkan kemungkinan kas yang diperoleh apabila aset tetap tersebut dijual. Menurut Manihuruk dan Farahmita (2015), perusahaan yang memiliki intensitas aset tetap yang lebih besar cenderung untuk memilih model revaluasi terhadap pencatatan aset tetapnya. Dimana model revaluasi dapat lebih mencerminkan nilai aset sesungguhnya.

Tay (2009) berhasil memberikan bukti empiris pada perusahaan di New Zealand bahwa perusahaan dengan *fixed asset intensity* (intensitas aset tetap) yang tinggi akan cenderung memilih metode revaluasi. Hasil tersebut didukung oleh Seng dan Su (2010) yang melakukan penelitian mengenai insentif manajerial dibalik revaluasi aset tetap terhadap perusahaan di New Zealand pada tahun 1999 hingga 2003. Serta Manihuruk dan Farahmita (2015) yang melakukan penelitian pada beberapa perusahaan di negara anggota ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Filipina pada tahun 2008 hingga 2013, mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan metode revaluasi aset tetap berhasil menemukan bahwa semakin besar *fixed asset intensity* (intensitas aset tetap) perusahaan maka akan semakin besar perusahaan memilih menggunakan metode revaluasi untuk mencatat aset tetapnya.

Yulistia, dkk (2015) meneliti perusahaan di Indonesia dan tidak berhasil membuktikan bahwa *fixed asset intensity* berpengaruh terhadap

revaluasi aset tetap. Namun, penelitian mengenai revaluasi aset tetap dan penurunan ekuitas oleh Lin dan Peasnell (2000) berhasil memberikan bukti empiris terhadap perusahaan di United Kingdom pada tahun 1989 dan 1991 bahwa semakin tinggi intensitas aset tetap maka kecenderungan manajer untuk melakukan revaluasi akan semakin besar. Nurjanah (2013), Wicaksana (2016), dan Latifa dan Haridi (2016) melakukan penelitian pada perusahaan di Indonesia dan memberikan hasil bahwa struktur aset berpengaruh terhadap keputusan revaluasi aset tetap. Serta penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani (2016) terhadap perusahaan manufaktur di Indonesia dan Singapura berhasil memberikan bukti empiris bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara *fixed asset intensity* (intensitas aset tetap) terhadap pemilihan metode revaluasi aset tetap perusahaan.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis menarik hipotesis sebagai berikut:

H_{3a} : *Fixed Asset Intensity* berpengaruh positif terhadap kebijakan revaluasi aset tetap di Indonesia.

H_{3b} : *Fixed Asset Intensity* berpengaruh positif terhadap kebijakan revaluasi aset tetap di Malaysia.

4. Pengaruh *Declining Cash Flow from Operation* Terhadap Kebijakan Revaluasi Aset Tetap

Semakin tinggi penurunan arus kas dari kegiatan operasi perusahaan, maka semakin tinggi kecenderungan manajer untuk melakukan revaluasi. Jika perusahaan mengalami penurunan arus kas operasi dibandingkan tahun

sebelumnya maka akan menyebabkan kreditur mengalami kekhawatiran yang cukup besar. Hal tersebut terjadi karena arus kas operasi yang semakin kecil akan menyebabkan kemungkinan pengembalian hutang yang diberikan oleh kreditur akan semakin kecil. Revaluasi aset tetap dilakukan oleh perusahaan dengan harapan agar aset yang dimilikinya akan meningkat sehingga kepercayaan perusahaan oleh kreditur akan meningkat.

Cotter dan Zimmer (1995) menjelaskan bahwa penilaian kembali aset tetap dapat menyebabkan nilai aset jaminan perusahaan yang lebih tinggi yang akan meyakinkan *debtholders* mengenai kemampuan perusahaan dalam membayarkan hutangnya melalui potensi perusahaan dalam mewujudkan aset yang nilainya lebih tinggi sesuai dengan nilai pasar. Hal tersebut dapat mengembalikan kapasitas pinjaman yang dilakukan oleh perusahaan sehingga penurunan arus kas operasi akan berpotensi terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan revaluasi aset yang dimilikinya.

Nurjanah (2013) dan Yulistia, dkk (2015) meneliti perusahaan di Indonesia dan tidak berhasil membuktikan bahwa *declining cash flow from operation* berpengaruh terhadap revaluasi aset tetap. Namun penelitian oleh Barac dan Šodan (2011) mengenai motif pemilihan kebijakan revaluasi pada perusahaan di Kroasia berhasil memberikan bukti empiris bahwa penurunan arus kas operasi (*declining cash flow from operation*) berpengaruh positif terhadap keputusan revaluasi aset tetap. Hasil penelitian ini didukung oleh Cotter dan Zimmer (1995) yang meneliti mengenai revaluasi aset dan penilaian kapasitas pinjaman.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis menarik hipotesis sebagai berikut:

H_{4a} : *Declining Cash Flow from Operation* berpengaruh positif terhadap kebijakan revaluasi aset tetap di Indonesia.

H_{4b} : *Declining Cash Flow from Operation* berpengaruh positif terhadap kebijakan revaluasi aset tetap di Malaysia.

5. Pengaruh *Ownership control* Terhadap Kebijakan Revaluasi Aset Tetap

Semakin tinggi jumlah sebaran suatu kepemilikan, maka semakin rendah kecenderungan manajer untuk melakukan revaluasi. Menurut Alemehmeti dan Paletta (2009) derajat pengawasan dan kontrol oleh manajer akan berkurang apabila jumlah pemegang saham semakin besar dalam hubungan antara *agent* dengan *principal*. Pemegang saham akan terlibat dalam pengambilan keputusan akuntansi dan ekonomik oleh manajer apabila dalam perusahaan tersebut terdapat pemegang saham major (*significant blockholders*). Revaluasi memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan di masa depan dengan menggunakan harga saham dan laba operasi sebagai indikatornya (Aboody *et al*, 1998).

Adanya hubungan positif antara revaluasi dengan kinerja keuangan masa depan perusahaan akan mendorong pemegang saham untuk memilih metode revaluasi dimana hal tersebut dapat meningkatkan kemakmuran mereka melalui *return* yang tinggi. Sedangkan bagi manajer, revaluasi akan berdampak terhadap penurunan profitabilitas perusahaan dalam jangka

pendek dimana hal tersebut dapat berdampak terhadap menurunnya bonus yang diterima manajer. Namun manajer adalah *agent* perusahaan dalam melaksanakan keputusan revaluasi sehingga hal tersebut akan berdampak pada perbedaan kepentingan pemilihan metode revaluasi antara manajer dengan pemegang saham.

Wicaksana (2016) meneliti perusahaan di Indonesia dan tidak berhasil membuktikan bahwa *ownership control* berpengaruh terhadap revaluasi aset tetap. Namun bukti empiris berhasil ditunjukkan oleh Nurjanah (2013) yang melakukan penelitian pada perusahaan di Indonesia. Nurjanah (2013) menemukan bahwa terdapat hubungan negatif antara *ownership control* terhadap revaluasi pada manajemen perusahaan dengan saham yang terkonsentrasi oleh pemilik.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis menarik hipotesis sebagai berikut:

H_{5a} : *Ownership control* berpengaruh negatif terhadap kebijakan revaluasi aset tetap di Indonesia.

H_{5b} : *Ownership control* berpengaruh negatif terhadap kebijakan revaluasi aset tetap di Malaysia.

6. Kebijakan Revaluasi Aset Tetap di Indonesia dan Malaysia

Manihuruk dan Farahmita (2015) melakukan penelitian terhadap anggota ASEAN yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Filipina pada rentang waktu tahun 2008 hingga 2013. Dari hasil penelitian tersebut terdapat 817 perusahaan di Malaysia yang melakukan revaluasi aset tetap

dari total 3.733 perusahaan Hal tersebut menunjukkan bahwa sekitar 21,87% perusahaan Malaysia memilih melakukan revaluasi aset tetap. Sedangkan di Indonesia dari 1.439 perusahaan hanya 39 perusahaan yang memilih melakukan revaluasi aset tetap atau sekitar 2,7% perusahaan Indonesia yang memilih melakukan revaluasi aset tetap.

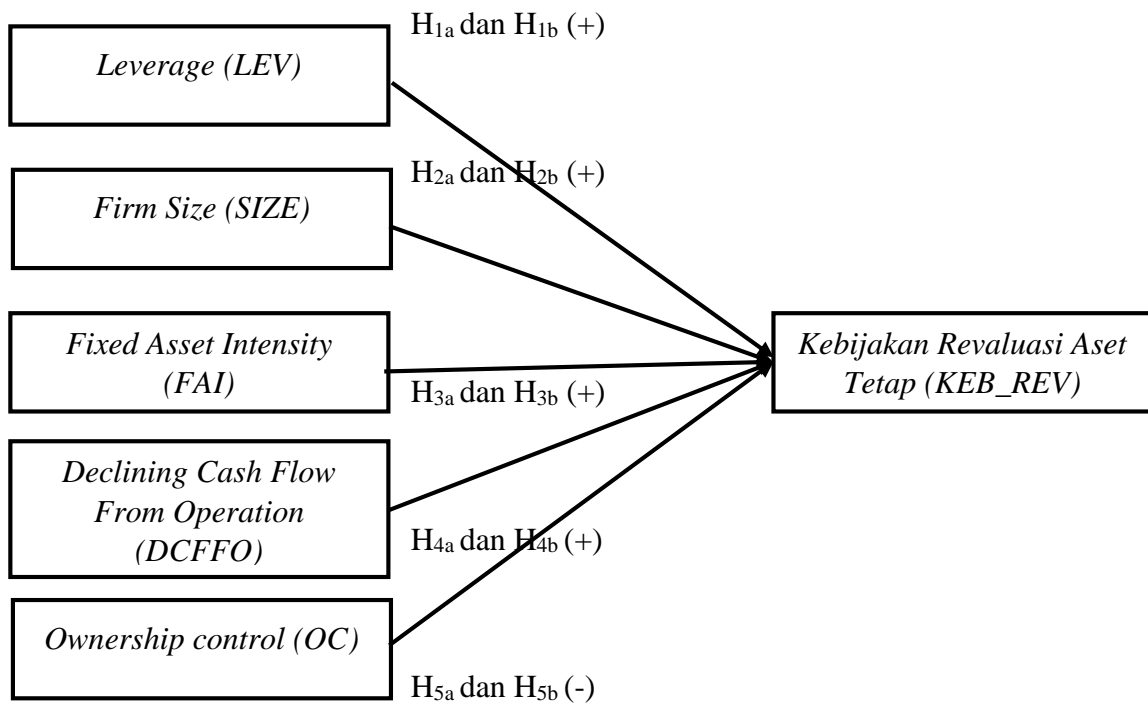
Malaysia merupakan negara yang menganut sistem hukum *common law* sedangkan Indonesia menganut sistem hukum *civil law* (Umar, 2013). Negara yang menganut sistem hukum *common law* akan memberikan perlindungan yang lebih baik kepada investor dibandingkan negara yang menganut sistem hukum *civil law* (Graff, 2006). Hal tersebut disebabkan karakteristik standar dan kebijakan akuntansi yang dimiliki oleh sistem hukum *common law* lebih ketat serta proteksi atas hak pemegang saham dan kreditor lebih kuat jika dibandingkan dengan sistem hukum *civil law* (Beck *et al*, 2001). Oleh sebab itu lebih banyak perusahaan Malaysia yang lebih memilih melakukan revaluasi aset tetap dibandingkan dengan perusahaan Indonesia.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis menarik hipotesis sebagai berikut:

H₆ : Terdapat perbedaan kebijakan revaluasi aset tetap di Indonesia dan Malaysia.

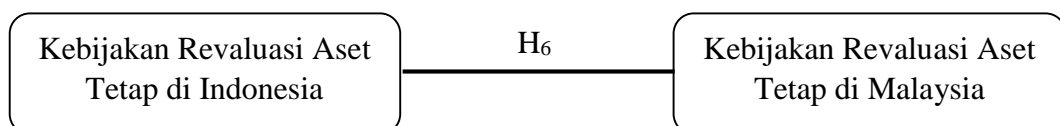
D. Model Penelitian

Berdasarkan tinjauan pustaka dan tinjauan penelitian terdahulu maka kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1
Model Penelitian

Penelitian ini akan membandingkan variabel dependen kebijakan revaluasi aset tetap dengan membuktikan bahwa terdapat perbedaan penerapan kebijakan revaluasi aset tetap di Indonesia dan Malaysia.



Gambar 2.2
Model Penelitian